



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

# **DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2020**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2020  
Ringkasan Eksekutif  
(Executive Summary)**

## **1 Pendahuluan**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Salah satu faktor kunci untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tersedianya data dan Informasi lingkungan bagi seluruh pihak. Penyusunan DIKPLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dimaksudkan untuk memberikan data dan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup dan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen ini dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

## **2 Analisis Lingkungan Hidup Daerah**

Analisis kondisi lingkungan hidup daerah dilakukan dengan menggunakan model DPSIR (*driving force-pressure-state-impact-response*). Model DPSIR adalah kerangka berpikir yang mengasumsikan hubungan sebab-akibat antara komponen yang saling berinteraksi dari sistem sosial, ekonomi dan lingkungan. DPSIR telah menjadi alat yang efektif untuk mengatur dan mengomunikasikan masalah lingkungan yang kompleks. Pada model DPSIR, aktivitas manusia dilihat sebagai pendorong (*driving force*) terjadinya tekanan (*pressure*) terhadap ekosistem, yang mempengaruhi terjadinya perubahan di ekosistem (*state*) yang pada

akhirnya berdampak pada kehidupan manusia (*impact*), untuk kemudian ditanggapi melalui berbagai strategi penanganan risiko (*response*).

## **2.1 Tata Guna Lahan**

### **2.1.1 Driving Forces**

Faktor yang memberi pengaruh signifikan terhadap tata guna lahan di wilayah DKI Jakarta adalah pertumbuhan penduduk. Adanya peningkatan penduduk wilayah DKI Jakarta sejalan dengan perkembangan fisik lahan terbangun yang diperuntukkan bagi fasilitas atau sektor yang ada, hal ini akan memicu terjadinya perubahan penutupan lahan, sehingga lahan yang bervegetasi akan terancam dialihfungsikan menjadi lahan terbangun. Meningkatnya jumlah penduduk juga berbanding positif dengan meningkatnya kebutuhan jumlah ruang untuk tempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta.

### **2.1.2 Pressure**

Ketersediaan lahan menjadi permasalahan dalam melakukan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengimbangi kebutuhan aktivitas sosial dan perekonomian, perubahan fungsi lahan yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta cenderung merubah kawasan resapan air menjadi kawasan pemukiman atau menjadi *Central Business District* (CBD). Selain alih fungsi lahan, tekanan lain terhadap keseimbangan tata guna lahan adalah adanya penguasaan lahan oleh pihak-pihak tertentu secara illegal.

### **2.1.3 State**

Berdasarkan kondisi tata ruang saat ini, peruntukan lahan DKI Jakarta didominasi oleh lahan terbangun yang digunakan sebagai kawasan pemukiman dan perkantoran. Adanya alih fungsi lahan yang dilakukan menyebabkan ketidakseimbangan tata ruang di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ketidakseimbangan tata ruang memberikan pengaruh terhadap kondisi fisik dan sosial di DKI Jakarta antara lain: penurunan muka air tanah, sedimentasi badan air, minimnya ruang terbuka hijau, dan berkurangnya ruang interaksi masyarakat.

#### **2.1.4 Impact**

Kondisi fisik tata ruang Provinsi DKI Jakarta yang semakin tidak seimbang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung kepada perikehidupan masyarakat. Beberapa dampak yang kerap timbul adalah banjir, sengketa lahan, penurunan estetika lansekap, ketidaknyamanan termal, dan *urban heat island*.

#### **2.1.5 Responses**

Untuk mencapai penggunaan lahan yang lebih efisien dan seimbang, telah dilakukan upaya-upaya jangka pendek maupun kebijakan jangka menengah hingga panjang oleh pemerintah DKI Jakarta. Upaya adaptasi bentuk hunian terhadap minimnya lahan, optimalisasi Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Biru melalui penanaman pohon dan mangrove di pesisir merupakan bentuk upaya jangka pendek. Dalam kontes kebijakan jangka menengah hingga panjang pemerintah provinsi DKI Jakarta menyusun kebijakan tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW, Rencana Detail Tata Ruang/RDTR, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), *Urban Development Guide Line* serta upaya Reforma Agraria dan penerapan *Green Infrastruktur*.

### **2.2 Kualitas Air**

#### **2.2.1 Driving Forces**

*Driving force* (faktor penyebab) kualitas air di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Provinsi DKI Jakarta dan status Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian di Indonesia. Peningkatan tersebut menyebabkan peningkatan beban pelayanan sanitasi publik sehingga pelayanan dasar kebutuhan sanitasi dan air bersih untuk masyarakat belum dapat terpenuhi. Keterbatasan jaringan penyediaan air bersih juga menjadi salah satu faktor pendorong terhadap penurunan kualitas badan air di DKI Jakarta.

#### **2.2.2 Pressure**

Kurangnya akses terhadap layanan sanitasi dan air bersih dapat menyebabkan degradasi terhadap kualitas air baik air tanah, air sungai, maupun air situ/waduk. Kebutuhan pertumbuhan ekonomi sendiri menyebabkan banyaknya kawasan perkantoran dan perindustrian yang tumbuh di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pertumbuhan industri ini berdampak pada pembuangan limbah baik secara langsung maupun secara

tidak langsung sehingga mempengaruhi kualitas air di wilayah DKI Jakarta. *Pressure* lain kualitas air di DKI Jakarta adalah kondisi geografis DKI Jakarta yang berupa dataran rendah sehingga DKI Jakarta menjadi muara dari sumber air di sekitar wilayah Jakarta. Pencemaran yang terjadi di hulu menyebabkan Provinsi DKI Jakarta sebagai hilir juga mengalami pencemaran sehingga kualitas air mengalami penurunan.

### **2.2.3 State**

Pemantauan kualitas air dilakukan di beberapa titik sumber air berupa air sungai, air situ/danau, air tanah, dan muara Teluk Jakarta. Hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi pencemaran air, yakni metode *Pollution Index* (PI). Secara garis besar, hampir seluruh sungai DKI Jakarta berstatus Cemar Sedang hingga Berat, situ atau waduk yang berada di belahan utara Provinsi DKI Jakarta memiliki status mutu air yang lebih buruk (sedang-berat) dari pada situ atau waduk yang berada di bagian selatan (ringan-sedang), dan perairan teluk Jakarta telah tercemar ringan hingga sedang. Sedangkan untuk kualitas air tanah lebih dari 50 lokasi pemantauan memiliki status tercemar.

### **2.2.4 Impact**

Salah satu akibat dari penurunan kualitas air di wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah meningkatnya kasus *waterborne disease*. *Waterborne diseases* merupakan penyakit yang ditularkan ke manusia akibat adanya cemaran baik berupa mikroorganisme ataupun zat kimia pada air. Selain peningkatan jumlah penderita *waterborne disease*, salah satu akibat yang ditimbulkan dari penurunan kualitas air adalah ketersediaan air bersih. Penurunan kualitas air sungai di DKI Jakarta menyebabkan PDAM tidak dapat menggunakan sumber air dari seluruh sungai di DKI Jakarta.

### **2.2.5 Responses**

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam menangani masalah kualitas air, baik upaya jangka pendek maupun kebijakan jangka panjang. Upaya jangka pendek yang telah dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) skala pemukiman sebanyak 5 (lima) lokasi di

RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) dan 4 (empat) lokasi di waduk serta melakukan revitalisasi tangki septik di rumah jaga pompa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lokasi rumah jaga pompa untuk menurunkan pencemaran air dan tanah. Selain itu pemerintah DKI Jakarta juga berupaya memperbaiki kebocoran jaringan air bersih untuk mengurangi jumlah abstraksi air tanah. Dalam konteks kebijakan jangka panjang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan target pencapaian sebesar 75% cakupan wilayah pelayanan air limbah pada tahun 2022 melalui percepatan Jakarta *Sewerage System* (JSS) yang bekerja sama dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pemerintah (KPIP).

## **2.3 Kualitas Udara**

### **2.3.1 Driving Forces**

*Driving force* penurunan kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Provinsi DKI Jakarta dan status Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk akan diikuti oleh pertumbuhan sektor lain, seperti industri, transportasi dan konstruksi yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan berupa pencemaran udara, sehingga menurunkan kualitas udara perkotaan.

### **2.3.2 Pressure**

Berdasarkan kajian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 75 persen pencemaran udara disumbang oleh transportasi. Selain itu, sektor industri membutuhkan energi untuk mendukung kegiatan operasional sehingga konsumsi energi cenderung meningkat setiap tahunnya. Selain itu, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan masih tergolong rendah di Provinsi DKI Jakarta.

### **2.3.3 State**

Peningkatan dan penurunan kualitas udara dapat dilihat berdasarkan Indeks Kualitas Udara (IKU) perkotaan setiap tahunnya, dengan parameter yang digunakan pada uji coba IKU ini adalah NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>. Tren IKU berdasarkan pemantauan udara ambien Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cenderung mengalami peningkatan yang berarti sejak tahun

2016 hingga 2019. Selain itu kondisi udara juga digambarkan dengan suhu udara ambien. Sebagian besar wilayah pemantauan di DKI Jakarta mengalami kenaikan rata-rata suhu ambien sepanjang tahun 2019.

#### **2.3.4 Impact**

Penurunan kualitas udara memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, seperti partikulat dapat mengakibatkan ISPA, bahkan pada ukuran terkecil ( $<2.5 \mu\text{m}$ ) dapat masuk ke dalam paru-paru dan jantung. Karbon monoksida (CO) bersifat racun yang berbahaya dan mampu membentuk ikatan yang kuat dengan pigmen darah (Hb), demikian juga dengan ozon ( $\text{O}_3$ ) dimana dapat menyebabkan penyakit katarak dan iritasi pada tumbuhan. Selain itu, peningkatan suhu ambien udara dapat merubah iklim mikro perkotaan. Tingginya kandungan senyawa kimia seperti Sulfur Dioksida ( $\text{SO}_2$ ) dan Nitrogen Oksida ( $\text{NO}_x$ ) pada atmosfer memicu reaksi kimia yang menimbulkan fenomena hujan asam.

#### **2.3.5 Responses**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki upaya untuk meningkatkan kualitas udara perkotaan melalui program-program yang diselenggarakan dan juga regulasi yang telah diterbitkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, dimana instruksi tersebut berisikan tujuh inisiatif yang ditujukan kepada pihak terkait untuk secara kolaboratif melakukan upaya pengendalian pencemaran udara.

### **2.4 Resiko Bencana**

#### **2.4.1 Driving Forces**

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta yang semakin meningkat setiap tahunnya dapat disebabkan oleh faktor ekonomi dan didukung dengan fakta bahwa DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara yang memegang kunci perekonomian negara, dimana tentunya memicu urbanisasi penduduk dari daerah ke Provinsi DKI Jakarta, sehingga meningkatkan kerentanan baik kerentanan fisik maupun sosial.

### **2.4.2 Pressure**

Provinsi DKI Jakarta memiliki ancaman bencana yang antara lain disebabkan karena penggunaan air tanah yang berlebihan, hunian di sekitar bantaran sungai, serta alih fungsi lahan untuk menunjang kebutuhan ekonomi dan hunian. Karakteristik ekonomi sebagian masyarakat dengan *supply* perumahan yang tersedia tidak berkesesuaian, membuat bertambahnya pemukiman padat penduduk dan penggunaan lahan sebagai pemukiman yang tidak sesuai dengan aturan, contohnya pemukiman yang didirikan di bantaran sungai sehingga menyebabkan pendangkalan dan penyempitan aliran sungai. Selain itu, terjadinya banjir dan genangan air di Provinsi DKI Jakarta juga disebabkan oleh berkurangnya wilayah-wilayah resapan air akibat dibangunnya hunian pada lahan basah atau daerah resapan air serta semakin padatnya pembangunan fisik.

### **2.4.3 State**

Bencana yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah DKI Jakarta adalah banjir dikarenakan tingginya intensitas yang terjadi, tercatat 66 titik lokasi pada 90 kecamatan terjadi kasus banjir selama tahun 2019 dengan jumlah RW terdampak yang terbanyak berada di wilayah administrasi Jakarta Barat. Lama genangan ketika banjir di musim penghujan berkisar 1-2 hari. Daerah yang memiliki titik banjir tersebar pada 5 wilayah administrasi dengan ketinggian air rata-rata sebesar 10 - 250 cm, ketinggian maksimum berada di bulan April, kemudian di bulan Mei ketinggian air mulai menurun signifikan hingga pada bulan Juni-September 2019.

### **2.4.4 Impact**

Bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta tentunya memiliki dampak yang negatif, salah satunya terhadap penduduk yang rentan terkena risiko bencana. Dampak bencana banjir membuat 3.685 orang penduduk harus mengungsi dan 2 orang penduduk meninggal dunia, dengan jumlah korban terdampak terbanyak berada di wilayah administrasi Jakarta Barat selama tahun 2019. Bencana lain juga memiliki dampak yang merugikan masyarakat seperti kebakaran. Kebakaran menimbulkan kerugian hingga



mencapai Rp 332.051.939.000,-. Selain itu, bencana kekeringan juga menimbulkan perkiraan nilai kerugian mencapai Rp 12.175.375,- jika dihitung berdasarkan jumlah air yang didistribusikan oleh PAM Jaya.

#### **2.4.5 Responses**

Upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan risiko bencana mengacu pada Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun BPBD Provinsi DKI Jakarta setiap lima tahun. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut RPB Provinsi merupakan wujud dari upaya pemerintah daerah terkait untuk merumuskan program-program kegiatan dan fokus prioritas penanggulangan bencana. Telah direncanakan kawasan evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana. Jalur evakuasi bencana adalah jaringan jalan yang dilalui Transjakarta, jalan arteri menuju lokasi kawasan evakuasi bencana utama dan menuju fasilitas vital, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Halim Perdana Kusuma.

### **2.5 Perkotaan**

#### **2.5.1 Driving Forces**

Meskipun mengalami penurunan dalam tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat urbanisasi yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta cukup besar sehingga kepadatan penduduk di DKI Jakarta mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS, tingkat kepadatan penduduk di DKI Jakarta pada tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan dari 15.633 jiwa/km<sup>2</sup> menjadi 16.704 jiwa/km<sup>2</sup>. Peningkatan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk ini memicu berbagai akibat pada ekosistem perkotaan dalam konteks fisik dan sosial.

#### **2.5.2 Pressure**

Pressure yang timbul dari kenaikan jumlah penduduk dan perekonomian apabila ditinjau dari segi perkotaan adalah meningkatnya aktivitas masyarakat perkotaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas tersebut memberikan tekanan terhadap lingkungan perkotaan berupa emisi, kebisingan, air limbah, sampah dan juga alih fungsi lahan.

### **2.5.3 State**

Tingginya aktivitas perkotaan memacu peningkatan limbah yang dihasilkan. Kondisi fisik lingkungan perkotaan dapat digambarkan dalam dimensi fisik dan sosial. Dalam dimensi fisik, kota Jakarta mengalami penurunan kualitas lingkungan yang nyata seperti penurunan muka tanah, kerusakan badan air, intrusi air laut, dan penurunan kualitas udara. Disisi lain, seiring dengan penurunan kualitas fisik, Provinsi DKI Jakarta juga berada dalam kondisi sosial ekonomi yang tidak ideal, salah satunya adalah adanya kesenjangan sosial ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.

### **2.5.4 Impact**

Kondisi lingkungan perkotaan yang sudah dijelaskan sebelumnya memberikan dampak negatif pada perikehidupan manusia seperti rawannya bencana banjir, munculnya wabah penyakit, ketidaknyamanan termal, kerugian ekonomi dan juga konflik horizontal.

### **2.5.5 Responses**

Telah dilakukan upaya-upaya jangka pendek maupun kebijakan jangka menengah hingga panjang dalam mengatasi masalah perkotaan yang kompleks di Provinsi DKI Jakarta, diantaranya adalah revitalisasi atau normalisasi lingkungan, adaptasi terhadap perubahan iklim dan penerapan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat. Dalam konteks kebijakan jangka panjang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan percepatan pembangunan pada sektor transportasi publik, sektor air limbah, sektor sampah dan juga peningkatan kerja sama penta-helix antara pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan media.

## **2.6 Tata Kelola**

### **2.6.1 Driving Forces**

Pertumbuhan penduduk sebagai *driving force* utama dalam semua aspek lingkungan menjadi acuan dalam *driving force* dalam aspek tata kelola lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan pemenuhan hidup masyarakat secara ekonomi juga meningkat. Peningkatan kebutuhan mendorong pihak-pihak penyedia kebutuhan hidup dari sektor industri, transportasi, konstruksi, perdagangan, bahkan

pemerintahan berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa adanya tata kelola yang baik, dorongan ekonomi membuat berbagai kegiatan dan juga pembangunan memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup. Salah satu bentuk upaya untuk mendorong adanya tata kelola lingkungan adalah mekanisme perizinan lingkungan, penganggaran kegiatan pengelolaan lingkungan dan juga kearifan lokal yang telah ada di masyarakat sejak lama.

### **2.6.2 Pressure**

Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang memiliki faktor heterogenitas yang sangat tinggi. Heterogenitas Provinsi DKI Jakarta mencakup segala aspek seperti keberagaman suku bangsa, agama, budaya, pendidikan, serta tingkat ekonomi. Masalah-masalah yang terjadi selama berkegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup sehingga muncul pengaduan-pengaduan dan gugatan kepada pemerintah menjadi salah satu *pressure* tata kelola lingkungan hidup. Selain itu, ketidaktaatan para pelaku industri terhadap dokumen lingkungan yang telah ditetapkan juga menjadi tekanan terhadap upaya mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik (*good environmental government*).

### **2.6.3 State**

Tata kelola lingkungan di Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dibantu dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup yang di setiap kota administrasi dan kabupaten administrasi, serta unit-unit pelaksana teknis. Jumlah total personel dan tingkat pendidikan menjadi gambaran kondisi penyelenggara pemerintahan dalam urusan pengelolaan lingkungan. Sedangkan jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan program-program yang diinisiasi masyarakat menjadi gambaran kesadaran pengelolaan lingkungan oleh masyarakat. Selain itu, jumlah izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga menjadi gambaran kinerja pengelolaan lingkungan pemerintah daerah.

#### **2.6.4 Impact**

Dampak yang timbul dari tata kelola yang buruk adalah penurunan kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta digambarkan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Selain itu, dampak dari pengelolaan lingkungan yang kurang baik adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

#### **2.6.5 Responses**

Respons yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terhadap upaya terwujudnya tata kelola lingkungan yang baik adalah dengan melakukan apresiasi terhadap masyarakat yang telah ikut berperan aktif dalam mengelola lingkungan hidup, melakukan pengawasan kegiatan lingkungan hidup, melakukan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan hidup, serta usaha dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta didukung oleh peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, dan Instruksi Gubernur.

### **2.7 Lain – Lain**

#### **2.7.1 Driving Forces**

Permasalahan kesehatan, kemiskinan, dan pendidikan menjadi sektor yang berhubungan langsung dengan kondisi lingkungan. Hal ini sangat berhubungan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup dan hak mendapatkan kehidupan yang layak. Keinginan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah faktor yang mendorong untuk meningkatkan tingkat kesehatan, ekonomi dan pendidikan masyarakat.

#### **2.7.2 Pressure**

Bentuk-bentuk tekanan dalam aspek kesehatan, ekonomi dan pendidikan masyarakat adalah adanya wadah penyakit, tingkat kemiskinan dan masih adanya anak usia sekolah yang memiliki minat sekolah rendah.

### **2.7.3 State**

Kondisi tingkat kesehatan, ekonomi dan pendidikan dapat dilihat berdasarkan daya beli, persentase penduduk miskin, jumlah penderita penyakit tertentu, rata-rata lama sekolah dan persentase anak usia sekolah yang tidak bersekolah.

### **2.7.4 Impact**

Dampak dari rendahnya tingkat kesehatan, ekonomi dan pendidikan masyarakat adalah peningkatan jumlah orang yang terjangkau suatu penyakit dan korban jiwa karena penyakit tersebut, peningkatan jumlah pengangguran, peningkatan jumlah penduduk miskin, dan peningkatan jumlah anak yang putus sekolah.

### **2.7.5 Responses**

Dalam rangka penanganan masalah pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuat beberapa upaya dan program. Adapun beberapa upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemiskinan melalui dua pendekatan yaitu: mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat miskin dan meningkatkan produktivitas warga.

## **3 Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah**

Karena adanya pandemic COVID-19 yang terjadi selama proses penyusunan dokumen ini, proses partisipatif dilakukan melalui jajak pendapat secara online dengan instansi pemerintahan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Media serta praktisi individual. Berdasarkan jajak pendapat tersebut didapatkan total responden sebanyak 70 responden. Data tersebut kemudian diolah dengan metode perbandingan berpasangan (Pairwise Comparison) sehingga didapatkan 5 (lima) isu prioritas lingkungan hidup dengan nilai tertinggi yaitu: Banjir, Rob dan Genangan; Tata Kelola Lingkungan Hidup; Persampahan; Tata Gunal Lahan; dan Pencemaran Sumber Daya Air.

### **3.1 Banjir, Rob dan Genangan**

Banjir, rob, dan genangan menjadi isu prioritas pertama dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

DKI Jakarta pada tahun 2019. Banjir, rob, dan genangan layak menjadi isu prioritas karena memang dampak yang ditimbulkan sangat besar dan luas, baik kerugian secara finansial maupun korban jiwa serta masalah kesehatan. Kerentanan Provinsi DKI Jakarta terhadap banjir cukup besar. Provinsi DKI Jakarta memiliki 8.54% penduduk miskin, 12.9% masyarakat dalam kelompok umur rentan, dan 0.05% difabel. Selain itu, berdasarkan Kajian Resiko Bencana (KRB) Provinsi DKI Jakarta, potensi kerugian akibat banjir mencapai 20 T, dan berdampak pada 3.852.545 jiwa.

### **3.2 Tata Kelola Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

### **3.3 Persampahan**

Isu terkait persampahan menjadi isu lingkungan prioritas ketiga di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019. Persampahan menjadi isu prioritas utama karena seiring dengan semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk dan semakin tinggi dan beragam kebutuhan manusia, akan semakin tinggi timbulan dan semakin tinggi keragaman sampah yang di hasilkan. Disisi lain, kapasitas pengelolaan sampah sangat terbatas.

Selain itu, dampak dari sampah yang tidak terkelola dengan baik secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat seperti penurunan estetika lingkungan dan ketidaknyamanan akibat tumpukan sampah tidak terkelola dan bau yang di timbulkan. Lebih jauh lagi jika keadaan tersebut

berlanjut, akan muncul gangguan kesehatan dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Sehingga pada akhirnya, suatu daerah yang tidak dapat mengelola sampah dengan baik akan berdampak sistemik pada kesejahteraan masyarakat.

### **3.4 Tata Guna Lahan**

Isu terkait tata guna lahan menjadi isu lingkungan prioritas keempat di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019. Tata guna lahan adalah faktor penentu aktivitas dan sirkulasi dalam suatu daerah. Tata guna lahan memiliki hubungan timbal balik dengan kebudayaan masyarakat pada suatu daerah tertentu. Kebudayaan akan mempengaruhi kondisi tata guna lahan, dan sebaliknya tata guna lahan yang telah ditetapkan akan membawa kebudayaan baru.

Perubahan tata guna lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumber daya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Perubahan tata guna lahan adalah suatu keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia. Namun, hal yang tidak diinginkan adalah perubahan yang tidak terencana dan tidak terkendali. Gambaran kondisi Provinsi DKI Jakarta saat ini telah terjadi penurunan kualitas lingkungan dan ketidakseimbangan tata guna lahan adalah bukti telah terjadinya perubahan tata guna lahan yang perlu dikendalikan.

### **3.5 Pencemaran Sumber Daya Air**

Pencemaran sumber daya air menjadi isu lingkungan prioritas keempat Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019. Pencemaran air yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta tidak hanya berada pada konteks air permukaan dan air tanah namun juga kualitas air pada pesisir dan laut.

Pencemaran sumber daya air dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penduduk. Semakin besar jumlah penduduk maka jumlah air limbah yang dihasilkan juga akan semakin mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah air limbah yang dihasilkan tidak diikuti dengan peningkatan infrastruktur pengolahan air limbah sehingga terjadi pembuangan air limbah secara langsung ke badan air sehingga kualitas air akan mengalami penurunan.

Selain itu, pertumbuhan penduduk dapat memicu industri untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan penduduk yang semakin meningkat. Peningkatan aktivitas industri maka meningkatkan pula jumlah air limbah yang dihasilkan. Meskipun telah banyak peraturan terkait pembuangan air limbah ke badan air, masih banyak pula industri-industri yang melakukan pelanggaran terkait pembuangan air limbah ke badan air.

#### **4 Inovasi Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Berbagai inovasi dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan berkelanjutan atau *Continuous Improvement*. Adapun beberapa inovasi daerah dalam mengatasi isu lingkungan hidup yang telah dilakukan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Limbah Organik Dengan Budidaya Maggot
2. Program Kampung Tersenyum
3. Taman Maju Bersama
4. Pelebaran Trotoar Dan JPO Dan Jalur Sepeda
5. Jak- Lingko
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
7. *Transit Orinted Development* (TOD)
8. Penerapan *Solar Rooftop*
9. Moda Raya Terpadu (MRT) Dan LRT
10. Samtama : Sampah Tanggung Jawab Bersama
11. Bank Sampah Induk Satu Hati
12. *Jakarta Recycle Center*

Berbagai inovasi yang telah dilakukan membuktikan bahwa pembangunan kota yang pada tahap awalnya hanya ditekankan pada peningkatan produktivitas atau pertumbuhan ekonomi, kini telah mulai bergeser pada upaya-upaya yang lebih proporsional antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.